

Pengaruh pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten Sumbawa tahun 2004-2017

The Effect of Government Expenditure and the Economic Growth on the Human Development Index in Sumbawa Regency Period 2004-2017

¹ Ryllo Firmansyah, ² Abdul Hadi Iman, ³ Fitriah Pemata Cita

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Teknologi Sumbawa

Email: ryloffirmansyah31@gmail.com

ABSTRACT

Human development index is one of alternative for development measurement besides using Gross Domestic Gross. The value of Human development index in a county or region shows how far the country or region has reached the specified target, that is the life expectancy, basic education for all levels of society (without exception), and the level of expenditure and consumption that has reached a decent standard of living for The Human Development Index in Sumbawa Regency ranks 4th under Mataram city, Bima city, and West Sumbawa. The growth of the human development index in Sumbawa Regency was influenced by various factors including government expenditure in the health sector, in education, and economic growth. This study aims to determine the effect of government spending on the health sector, education, the economic growth on the human development index in Sumbawa Regency.

The Data was using secondary data with time-series form in the period 2004-2017. This study was using a quantitative method which is analyzing data or things related to numbers to analyze the problem in this study. The analysis method was using the OLS method.

Key words: Human development index, government expenditure in the health sector, in education, and economic growth

ABSTRAK

Indeks pembangunan manusia merupakan salah satu alternatif pengukuran pembangunan selain menggunakan Gross Domestic Bruto. Nilai IPM suatu negara atau wilayah menunjukkan seberapa jauh negara atau wilayah itu telah mencapai sasaran yang ditentukan yaitu angka harapan hidup, pendidikan dasar bagi semua lapisan masyarakat (tanpa kecuali), dan tingkat pengeluaran dan konsumsi yang telah mencapai standar hidup yang layak. Indeks Pembangunan Manusia di kabupaten Sumbawa berada di urutan ke 4 dibawah kota Mataram, kota Bima dan Sumbawa barat. Perkembangan IPM di kabupaten Sumbawa dipengaruhi berbagai faktor diantaranya pengeluaran pemerintah bidang kesehatan bidang pendidikan dan pertumbuhan ekonomi. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah sektor kesehatan, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia kabupaten Sumbawa.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data time series pada periode tahun 2004-2017. ini menggunakan metode kuantitatif yaitu menganalisis data atau hal-hal yang berhubungan dengan angka-angka untuk menganalisis masalah dalam penelitian ini, metode analisis dalam penelitian ini adalah metode OLS.

Kata Kunci : indeks pembangunan manusia, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan pertumbuhan ekonomi

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara sederhana pembangunan manusia dapat dimaknai sebagai usaha atau proses untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Pembangunan pada hakekatnya merupakan sarana untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dalam sebuah masyarakat. Untuk menilai keberhasilan pembangunan, perlu ada instrumen untuk mengukur tingkat kesejahteraan tersebut, salah satunya dengan cara menggunakan In

deks pembangunan manusia atau IPM. IPM berfungsi untuk mengukur capaian pembangunan manusia hingga bisa dikatakan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM merupakan cara yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan, keberhasilan atau kinerja suatu negara atau wilayah dalam bidang pembangunan manusia, terkait dengan faktor faktor yg mempengaruhinya, ini merupakan masalah yang menarik untuk diteliti (UNDP,2004)

Salah satu tolak ukur yang digunakan dalam melihat kualitas hidup manusia adalah IPM. IPM mencakup tiga bidang pembangunan manusia yang dianggap sangat mendasar yang dilihat dari kualitas fisik dan non fisik penduduk. Adapun 3 indikator tersebut yaitu: indikator kesehatan, tingkat pendidikan, dan indikator ekonomi. Kualitas fisik tercermin dari angka harapan hidup, sedangkan kualitas non fisik tercermin dari lamanya rata-rata penduduk bersekolah dan angka melek huruf, dan mempertimbangkan kemampuan ekonomi yaitu pengeluaran riil per kapita (Mirza, 2012).

Berdasarkan hasil perhitungan BPS, IPM di Kabupaten Sumbawa terus mengalami peningkatan Pada tahun 2004, IPM berada pada angka 63,20 meningkat menjadi 64,00 di tahun 2005 dan 64,76 pada tahun 2006. Peningkatan IPM tersebut antara lain ditandai oleh meningkatnya Angka Harapan Hidup (AHH) dari 59,00 pada tahun 2004 menjadi 59,50 pada tahun 2005. Peningkatan angka harapan hidup ini memberikan indikasi bahwa telah terjadi peningkatan taraf kesehatan dan kesadaran hidup sehat dalam masyarakat kita (BPS,2016).

Sementara indeks pendidikan yang terdiri dari angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah juga menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2004 angka melek huruf Kabupaten Sumbawa 87,90%. Ini berarti terdapat 22,10% penduduk usia 15 tahun keatas yang masih buta huruf. Sedangkan pada tahun 2007 angka melek huruf kita meningkat menjadi 89,69% yang berarti hingga tahun 2007 penduduk buta huruf di daerah kita tinggal tersisa 10,31%. rata-rata lama sekolah tidak bnyak mengalami peningkatan dari 7,10 tahun pada 2005 dan berada di angka yang sama 7,10 tahun pada tahun 2008, namun ini berarti bahwa rata-rata lama sekolah penduduk kita masih belum banyak berubah yakni 7 tahun atau berada pada jenjang kelas 1 SMP. Sedangkan dari segi indeks pendapatan, terjadi peningkatan dari Rp. 618.10 pada tahun 2005 menjadi 621.33 pada tahun 2007 (BPS, 2016).

Tinggi rendahnya tingkat IPM tidak bisa dilepaskan dari peran pemerintah. Pemerintah memiliki peran yang penting dalam mewujudkan pembangunan ekonomi melalui kebijakan fiskalnya. Instrumen kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yaitu pengalokasian dana atau anggaran melalui APBN/APBD yang berkaitan dengan fasilitas publik seperti pendidikan dan kesehatan (Budiono,2015).

Pengeluaran pemerintah digunakan untuk membiayai sektor-sektor publik yang penting, diantara kesemua sektor publik saat ini yang menjadi prioritas pemerintah dalam mencapai pembangunan kualitas sumber daya manusia, dalam kaitannya yang tercermin dari indeks pembangunan manusia adalah investasi pada sektor pendidikan dan kesehatan, diharapkan Investasi pada sektor ini akan berpengaruh pada peningkatan kualitas SDM dan mengurangi kemiskinan.

Pembangunan kesehatan dan pendidikan harus dipandang sebagai suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumberdaya manusia, yang antara lain diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dalam pengukuran IPM, kesehatan dan pendidikan adalah salah satu komponen utama selain pendapatan yang harus diprioritaskan. Pendidikan dan kesehatan

merupakan tujuan pembangunan yang mendasar di suatu wilayah. Kesehatan merupakan inti dari kesejahteraan, dan pendidikan adalah hal yang pokok untuk mencapai kehidupan yang layak. Pendidikan memiliki peran yang penting dalam membentuk kemampuan sebuah negara

berkembang untuk menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan (Todaro, 2006). Dalam hal ini bisa terwujud melalui alokasi pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan. Dengan meningkatnya alokasi pengeluaran pemerintah di sektor publik tersebut maka akan meningkatkan pula produktivitas penduduk.

Pengeluaran pemerintah dilihat dari bidang pendidikan, dimana pendidikan merupakan salah satu program yang sedang digalakkan pemerintah. Untuk itu sarana dan prasarana pendidikan terus ditingkatkan baik dari segi jumlah maupun mutunya. Penduduk usia sekolah diharapkan bisa tertampung seluruhnya pada sekolah yang telah ada. Adanya sembilan tahun, sangat membantu mengentaskan penduduk dari buta huruf, memperluas kesempatan untuk belajar dan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kesadaran akan pentingnya pendidikan telah lama dikemukakan oleh para ilmuwan. Pendidikan bisa diperoleh melalui pendidikan formal maupun pendidikan non formal.

Sumbawadalam bidang kesehatan dapat dilihat dari fasilitas-fasilitas kesehatan yang belum sepenuhnya dimiliki oleh semua desa, misalnya keberadaan puskesmas pembantu belum mencakup seluruh desa. Petugas kesehatan yang ada di Kabupaten Sumbawa belum mencukupi, sehingga pemerintah masih terus menambah jumlah petugas kesehatan dengan segala keterbatasan yang ada. Jumlah dokter masih terasa kurang bahkan untuk yang spesialis masih sistem kontrak, sehingga sering merupakan kendala bagi perbaikan kesehatan masyarakat. Hal ini akan tentu akan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Sumbawa.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang dapat di ambil sebagai kajian dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan bidang kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia tahun 2004-2017 ?
2. Bagaimana pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia tahun 2004- 2017 ?
3. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan secara bersama sama terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten Sumbawa 2004-2017 ?

1.3 Tujuan penelitian

Kabupaten Sumbawa telah tersedia sarana dan prasarana pendidikan formal dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Sedangkan pendidikan non formal meliputi berbagai kursus atau pelatihan keterampilan seperti mekanik, otomotif, listrik, bangunan, kerajinan dll. Dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan diharapkan secara otomatis dapat mempengaruhi beberapa faktor terutama yang berkaitan judul penelitian yaitu indeks pembangunan manusia.

Adapun Indikator kinerja kunci penyelenggaraan urusan wajib pendidikan adalah capaian angka melek huruf (AMH), rata-rata lama sekolah serta Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Angka Melek Huruf (AMH) merupakan salah satu komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia atau IPM (BPS SUMBAWA). Peran pemerintah di Kabupaten

1. Untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten Sumbawa tahun 2004-2017.
2. Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di kabupaten Sumbawa tahun 2004-2017
3. Untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan dan pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten Sumbawa tahun 2004-2017.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pembangunan Ekonomi

2.1.1 Pengertian Pembangunan Manusia

Definisi Pembangunan Manusia menurut UNDP (*United Nation Development Program*) adalah suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk. Jika mengacu pada pengertian tersebut, maka penduduk menjadi tujuan akhir dari pembangunan, sedangkan upaya pembangunan merupakan sarana (*principal means*) untuk tujuan tersebut. Definisi ini lebih luas dari defines

pembangunan yang hanya menekankan pada pertumbuhan ekonomi.

Dari definisi yang diberikan oleh UNDP tersebut mencerminkan bahwa manusia dalam suatu wilayah selayaknya memiliki dan diberikan pilihan-pilihan yang luas dan dibutuhkan dukungan dari pemerintah guna memberikan sarana bagi masyarakat untuk dapat memanfaatkan dan mengambil keputusan sesuai dengan pilihan yang diambilnya. Paradigma tersebut memunculkan pilihan-pilihan yang lebih luas bagi masyarakat seperti kebebasan politik, ekonomi dan sosial serta kesempatan untuk menjadi lebih kreatif dan produktif sesuai dengan hak-hak manusia yang menjadi bagian dari paradigma tersebut. Untuk

menjamin tercapainya tujuan pembangunan manusia, empat hal pokok yang perlu diperhatikan adalah produktivitas, pemerataan, kesinambungan, pemberdayaan (UNDP, 1995). Secara ringkas empat hal pokok tersebut mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Produktivitas. Penduduk harus dimampukan untuk meningkatkan produktivitas dan berpartisipasi penuh dalam proses penciptaan pendapatan dan nafkah. Pembangunan ekonomi, dengan demikian merupakan himpunan bagian dari model pembangunan manusia.
2. Pemerataan. Penduduk harus memiliki kesempatan/peluang yang sama untuk mendapatkan akses terhadap semua sumber daya ekonomi dan sosial. Semua hambatan yang memperkecil kesempatan untuk memperoleh akses tersebut harus dihapus, sehingga mereka dapat mengambil manfaat dari kesempatan yang ada dan berpartisipasi dalam kegiatan produktif yang dapat meningkatkan kualitas hidup.
3. Kesinambungan. Akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial harus dipastikan tidak hanya untuk generasi-generasi yang akan datang. Semua sumber daya fisik, manusia, dan lingkungan selalu diperbaharui.
4. Pemberdayaan penduduk harus berpartisipasi penuh dalam keputusan dan proses yang akan menentukan (bentuk/arah) kehidupan mereka, serta untuk berpartisipasi dan mengambil manfaat dari proses pembangunan

2.1.2 Indeks Pembangunan Manusia

Menurut UNDP (*United Nation Development Program*), Indeks pembangunan manusia (IPM) adalah pengukuran perbandingan dari angka harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. HDI digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup.

Indeks pembangunan manusia merupakan indeks komposit yang digunakan untuk mengukur pencapaian rata-rata suatu negara dalam tiga hal mendasar pembangunan manusia, yaitu: lama hidup, yang diukur dengan

angka harapan hidup ketika lahir dan angka kematian bayi (*infant mortality rate*) pendidikan yang diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas; dan standar hidup yang diukur dengan pengeluaran per kapita yang telah disesuaikan menjadi paritas daya beli. Nilai indeks ini berkisar antara 0-100.

Indeks Pembangunan Manusia mencakup tiga komponen yang dianggap mendasar bagi manusia dan secara operasional mudah dihitung untuk menghasilkan suatu ukuran yang merefleksikan upaya pembangunan manusia. Ketiga komponen tersebut adalah peluang hidup (*longevity*), pengetahuan (*knowledge*) dan hidup layak (*living standards*). Peluang hidup dihitung berdasarkan angka harapan hidup ketika lahir; pengetahuan diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf penduduk berusia 15 tahun ke atas; dan hidup layak diukur dengan pengeluaran per kapita yang didasarkan pada paritas daya beli (*purchasing power parity*).

IPM kemudian disempurnakan oleh *United Nation Development Programme* (1990). Alasan penyempurnaan tidak lain karena manusia adalah ukuran keberhasilan dari pembangunan. Sehingga ukuran "bobot" manusia saja tidaklah cukup, dan karenanya diperlukan penggabungan antara pencapaian penghasilan dengan kondisi fisik dan non fisik manusia. Rumus umum yang digunakan untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia adalah sebagai berikut:

IPM = $\frac{1}{3}$ (Indeks X_1 + Indeks X_2 + Indeks X_3) Dimana:
 X_1 = Indeks harapan hidup X_2 = Indeks pendidikan
 X_3 = Indeks standar hidup layak

Masing-masing komponen tersebut terlebih dahulu dihitung indeksnya sehingga bernilai antara 0 (terburuk) dan 1 (terbaik). Untuk memudahkan dalam analisa biasanya indeks ini dikalikan 100.

2.1.3 Pengeluaran Pemerintah

APBD merupakan salah satu Instrumen kebijakan pemerintah daerah yang didalamnya selain mencakup sumber-sumber pendapatan daerah tetapi juga berbagai pengeluaran pemerintah termasuk belanja bidang pendidikan

dan bidang kesehatan. Pengeluaran pemerintah memiliki beberapa fungsi yaitu fungsi alokasi dan fungsi redistribusi yang salah satu fungsinya yaitu alokasi untuk memenuhi permintaan masyarakat terhadap tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan publik yang tidak dapat dipenuhi oleh swasta.

2.1.3.1 Hubungan Antara Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Dan Bidang Kesehatan Dengan Indeks Pembangunan Manusia

Pemerintah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui alokasi pengeluaran pada sektor kesehatan dan pendidikan, pemerataan tingkat pendapatan serta penurunan angka kemiskinan melalui peningkatan pembangunan manusia yang tercermin dari angka IPM. Pemerintah sebagai pelaksana pembangunan tentunya membutuhkan modal manusia yang berkualitas sebagai modal dasar pembangunan. Manusia dalam perannya merupakan subjek dan objek pembangunan yang berarti manusia selain sebagai pelaku dari pembangunan juga merupakan sasaran pembangunan (Putra, 2015)

2.2.1 Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi dengan IPM

Menurut Midgley (1995), menjelaskan bahwa pembangunan sosial merupakan pendekatan pembangunan secara eksplisit berusaha mengintegrasikan proses pembangunan ekonomi dan sosial. Pembangunan sosial tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya pembangunan ekonomi, sedangkan pembangunan ekonomi tidaklah bermakna kecuali diikuti dengan peningkatan kesejahteraan sosial dari populasi sebagai suatu kesatuan. Pembangunan ekonomi atau lebih tepatnya pertumbuhan ekonomi merupakan syarat bagi tercapainya pembangunan manusia karena dengan pembangunan ekonomi terjamin peningkatan produktivitas dan peningkatan pendapatan melalui penciptaan kesempatan kerja.

Tingkat pembangunan manusia yang relatif tinggi akan mempengaruhi kinerja pertumbuhan ekonomi melalui kapabilitas penduduk dan konsekuensinya adalah peningkatan produktivitas dan kreativitas

masyarakat. Dengan meningkatnya produktivitas dan kreativitas tersebut, penduduk dapat menyerap dan mengelola sumberdaya yang penting bagi pertumbuhan ekonomi (Brata, 2004).

1. Pertama dari pertumbuhan ekonomi ke pembangunan manusia

GNP mempengaruhi pembangunan manusia, khususnya melalui aktivitas rumah tangga dan pemerintah; civil society seperti melalui organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat juga. Dalam membelanjakan pendapatannya, rumah tangga cenderung membelanjakan barang-barang yang memiliki kontribusi langsung terhadap pembangunan manusia seperti makanan, air, pendidikan dan kesehatan yang tergantung pada sejumlah faktor seperti tingkat dan distribusi pendapatan antar rumah tangga, siapa yang mengontrol alokasi pengeluaran dalam rumah tangga. Umumnya, penduduk miskin menghabiskan porsi pendapatannya lebih banyak ketimbang penduduk kaya untuk kebutuhan pembangunan manusia dan andil perempuan cukup besar dalam mengatur pengeluaran rumah tangga. Ketika tingkat kemiskinan tinggi, yang dikarenakan rendahnya pendapatan per kapita atau karena buruknya distribusi pendapatan, pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan pembangunan manusia menjadi rendah.

Peranan fungsi alokasi pemerintah untuk meningkatkan pembangunan manusia adalah fungsi total pengeluaran sektor publik, seberapa besar alokasi pengeluaran sektor publik untuk sektor pembangunan manusia, dan bagaimana pengeluaran tersebut dialokasikan. Peranan alokasi pengeluaran publik oleh pemerintah ini sangat memegang peranan yang sangat penting didalam pembangunan manusia.

BAB III METODO PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang menekankan pada data-data numerical (angka) yang di olah dengan metode statistika (Aswar, 2007). Menurut Subana dan sudrajad (2005: 25) penelitian kuantitatif dilihat dari segi tujuan, penelitian ini di pakai suatu teori, menyajikan suatu fakta atau mendiskripsikan statistic, dan untuk menunjukkan

hubungan antar variable dan ada pula yang sifatnya mengembangkan konsep, mengembangkan pemahaman atau mendiskripsikan banyak hal.

3.2 Klasifikasi Variabel

1. Variabel dependen atau variabel terikat yaitu : Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
2. variabel indeviden atau variabel bebas yaitu : pengeluaran pemerintah bidang Pendidikan, bidang Kesehatan dan Pertumbuhan Ekonomi.

1.3 Definisi Operasional Variabel

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah Indeks komposit yang digunakan untuk mengukur taraf kualitas hidup manusia yang dilihat dari pendidikan, kesehatan dan pertumbuhan ekonomi sebagai tolak ukur, dinyatakan dalam persen (%)
2. Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan adalah realisasi belanja/pengeluaran pemerintah dalam satu tahun yang digunakan untuk pembiayaan dan pemeliharaan dibidang pendidikan dinyatakan dalam rupiah (Rp)
3. Pengeluaran pemerintah bidang kesehatan adalah realisasi belanja/pengeluaran pemerintah dalam satu tahun yang digunakan untuk pembiayaan dan pemeliharaan dibidang kesehatan dinyatakan dalam rupiah (Rp).
4. Pertumbuhan Ekonomi adalah tingkat kenaikan PDB atau PNB rill pada suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan satu tahun sebelumnya menurut harga konstan tahun 2000 yang dinyatakan dalam persen (%)

3.4 Jenis dan Sumber data 3.4.1Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan data kualitatif, data kuantitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk angka-angka. Sedangkan data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk keterangan-keterangan/ angka-angka yang mengandung makna data kualitatif misalnya persepsi konsumen atau keterangan tentang gambaran umum lokasi penelitian.

3.4.2 Sumber Data

Klasifikasi sumber data yaitu data primer dan data sekunder, data primer adalah data yang secara langsung diambil dari objek penelitian oleh peneliti, sedangkan Data sekunder adalah yang diperoleh dari dokumen/file atau data yang diperoleh dari kantor atau Instansi terkait.Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer yaitu data yang didapat secara langsung dari objek penelitian.Data ini diperoleh dengan cara mengambil data secara langsung pada objek penelitian mengenai data berhubungan judul penelitian.

Jenis Sumber data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), jurnal, penelitian sebelumnya atau artikel yang dimuat di media massa, baik cetak maupun elektronik yang relevan dengan judul penelitian.Adapun data data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data IPM/Indeks pembangunan manusia di Data pengeluaran pemerintah dibidang pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Sumbawa 2004 - 2017
- b. Data pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sumbawa 2004 – 2017

3.6 Teknik Analisis Data

Model analisis data yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah model ekonometrika dengan teknik analisis data time series yakni dengan metode ordinary least square.Metode analisis yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antar variabel terikat dan

variabel bebasnya adalah dengan menggunakan model regresi berganda.

4.2 Hasil Analisis

4.4.1 Analisis Regresi Berganda

Analisis ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel – variabel bebas yaitu pengeluaran pemerintah dan pembangunan ekonomi mempunyai pengaruh terhadap indeks pembangunan ekonomi. Proses analisis regresi berganda tersebut menggunakan SPSS.

Adapun bentuk persamaan analisis regresi linier berganda dapat disusun sebagai berikut :

$$IPM = 59.415 + 1.368PP + 8.196PK + 0.013PE$$

Penjelasan :

IPM = Indeks Pembangunan Manusia PP = Pengeluaran Pendidikan

PK = Pengeluaran Kesehatan

PE = Pertumbuhan Ekonomi

Maka dari hasil perhitungan yang disajikan pada tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut ;

1. Nilai konstanta pada persamaan tersebut sebesar 59.415 artinya bahwa jika tidak ada perubahan pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi atau dianggap konstan (tetap), maka tingkat indeks pembangunan manusia sebesar 59.415 satuan.
2. Pengaruh variabel pengeluaran pemerintah pendidikan terhadap indeks pembangunan manusia. Berdasarkan perhitungan dengan program SPSS, maka diperoleh nilai koefisien regresi variabel pengeluaran pendidikan adalah sebesar 1.368 artinya untuk setiap peningkatan variabel pengeluaran pemerintah sebanyak satu satuan maka akan meningkatkan indeks pembangunan manusia sebesar 1.368 satuan dengan asumsi variabel lain tetap.
3. Pengaruh variabel pengeluaran kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia. Berdasarkan perhitungan dengan program SPSS, maka diperoleh nilai koefisien regresi variabel pengeluaran pendidikan adalah sebesar 8.196 artinya untuk setiap peningkatan variabel pengeluaran pemerintah sebanyak satu satuan maka akan meningkatkan indeks pembangunan manusia sebesar 8.196 satuan dengan asumsi variabel lain tetap.
4. Pengaruh variabel pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia. Berdasarkan perhitungan dengan program SPSS, maka diperoleh nilai koefisien regresi variabel pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 0.013 artinya untuk setiap peningkatan variabel pertumbuhan ekonomi sebanyak satu satuan maka akan meningkatkan indeks pembangunan manusia sebesar 0,013 satuan dengan asumsi variabel lain tetap.

4.5 Uji Statistik

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara individu dan bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Uji statistik ini meliputi Uji F, Uji-t dan Koefisien Determinasi (R^2)

1. Uji Parsial

Menurut Gujarati (2004), Uji t digunakan untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel independen secara individu terhadap variabel dependen dengan variabel yang lain konstan.

Untuk menguji pengaruh setiap variabel independen tersebut dapat dilakukan dengan membandingkan antara nilai signifikansi dengan taraf nyata 0,05 (5 persen) dan membandingkan nilai t-hitung dengan t-tabel. Berdasarkan analisis tersebut, maka hasil pengolahan data dapat dinyatakan sebagai berikut:

Tabel 4.8. Uji t

Variabel	t hitung	Signifikan
Pengeluaran pendidikan	7.053	0.958
Pengeluaran kesehatan	11.112	0.292
Pertumbuhan Ekonomi	3.056	0.012

Sumber : Lampiran data hasil SPSS, diolah

1. Tingkat signifikan pengaruh variabel pengeluaran pendidikan terhadap indeks pembangunan manusia. Dari hasil SPSS diperoleh T hitung untuk variabel pengeluaran pendidikan sebesar 7.053 dengan nilai signifikan 0.958 sedangkan nilai T tabel pada tingkat derajat kebebasan $df = 13-3 = 10$ pada $\alpha = 0.025$ adalah 2.228. Apabila nilai T hitung tersebut lebih besar daripada T tabel ($7.053 > 2.228$) yang

- berarti H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian variabel pengeluaran pemerintah tidak mempunyai pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap indeks pembangunan manusia.
2. Tingkat signifikan pengaruh variabel pengeluaran kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia. Dari hasil SPSS diperoleh T hitung untuk variabel pengeluaran pendidikan sebesar 11.112 dengan nilai signifikan 0.292. sedangkan nilai T tabel pada tingkat derajat kebebasan $df = 13-3 = 10$ pada $\alpha = 0.025$ adalah 2.228. Apabila nilai T hitung tersebut lebih besar daripada T tabel ($11.112 > 2.228$) yang berarti H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian variabel pengeluaran pemerintah tidak mempunyai pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap indeks pembangunan manusia.
 3. Tingkat signifikan pengaruh variabel pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia. Dari hasil perhitungan data dengan SPSS diperoleh T hitung untuk variabel pertumbuhan ekonomi sebesar 3.056. Sedangkan nilai T tabel pada tingkat derajat kebebasan $df = 13-3 = 10$ pada $\alpha = 5\%$ (0,05) adalah 2.228. Apabila t hitung 3.056 dibandingkan dengan nilai T tabel sebesar 2.228 maka nilai t hitung tersebut lebih besar daripada T tabel yang berarti H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian variabel pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap indeks pembangunan manusia.

2. Uji Simultan

Uji F diperlukan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen dalam model secara bersama-sama terhadap variabel dependennya. Uji F dapat dilakukan dengan melihat nilai *probability* dan derajat kepercayaan yang ditentukan dalam penelitian, atau membandingkan nilai F-tabel dengan nilai F- hitung, jika nilai *probability* < 0,05 atau $\alpha = 5$ persen dan jika nilai F-hitung lebih tinggi daripada T-tabel maka dapat dikatakan suatu variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependennya (Gujarati, 2004).

Tabel 4.9 Uji F

Model	Sum of Squares	Df	F	Sig.
Regression	14.681	3	3.491	.000 ^a
1 Residual	14.019	10		
Total	28.701	13		

Sumber : Lampiran data hasil SPSS, diolah

Dari Tabel 4.10 dapat diketahui f hitung sebesar 3,491 dengan tingkat signifikan 0,058. Sedangkan jika dibandingkan dengan F tabel ditentukan berdasarkan tabel dengan tingkat signifikan 5 % (0,05) dan $df_1 = (k-1) = 3$ serta $df_2 = (n-k) = 10$ sehingga di peroleh nilai f tabel sebesar 0,113. Karna nilai F hitung lebih besar dari F tabel ($3,491 > 0,113$) maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya variabel x yang terdiri dari variabel pengeluaran pemerintah dan pembangunan ekonomi secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

3. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi ini digunakan untuk menjelaskan seberapa besar pengaruh variabel-variabel bebas memiliki pengaruh terhadap variabel terikatnya. Nilai koefisien determinasi yang digunakan adalah R^2 (R square) (Gujarati, 2004).

Tabel 4.10.

Model	R	R Square
1	.715 ^a	.512

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Sumber : Lampiran data hasil SPSS, diolah Hasil R^2 sebesar 0.512 yang artinya

koefisien korelasi dalam penelitian ini sangat kuat terdapat hubungan yang sangat kuat antara variabel independen (kesehatan dan pendidikan) dan variabel dependent (IPM). Dikatakan sangat kuat karena sesuai dengan klasifikasi koefisien korelasi menurut Jonathan Sarwono (2009) . Yang ditunjukkan dari hasil koefisien determinasi sebesar 0,512 atau 51,2

% </> 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara variabel independent (kesehatan dan pendidikan). Sehingga variabel dependent dapat dipengaruhi oleh variabel independent baik secara parsial maupun serentak.

4.6. Analisis Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan yakni melalui pengujian pengaruh pengeluaran pemerintah bidang kesehatan, bidang pendidikan dan pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Sumbawa dengan menggunakan data tahun 2004-2017. Sehingga dalam menganalisis data penelitian ini digunakan model regresi linier berganda. Dalam menganalisis data penelitian ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah dibidang pendidikan dan kesehatan tidak berpengaruh signifikan dengan indeks pembangunan manusia.

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Dalam hubungannya dengan uraian diatas akan dapat disajikan pembahasan dari hasil penelitian ini yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1.6.1 Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Berdasarkan hasil analisis bahwa secara parsial tingkat pendidikan di kabupaten Sumbawa tidak berpengaruh secara statistic terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Begitu juga dengan Pengaruh pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia tidak berpengaruh sama seperti pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, jika dilihat dari hasil analisa berdasarkan tahun 2004 sampai 2017 tingkat pendidikan ternyata belum bisa berpengaruh dimana perhatian pemerintah terhadap bidang pendidikan belum terealisasi dengan benar, diberbagai wilayah di Sumbawa yang belum terjamah pembangunan, tingkat kesadaran masyarakat berdasarkan angka melek huruf dan rata rata lama sekolah banyak masyarakat yang memilih bekerja daripada bersekolah. Namun diharapkan dengan lebihnya perhatian pemerintah di tahun 2018 dan seterusnya kesadaran masyarakat terhadap pendidikan dapat lebih baik sehingga pendidikan diharapkan dapat menjadi faktor yang mendorong meningkatnya IPM di kabupaten Sumbawa seperti pertumbuhan ekonomi.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, total penerimaan daerah yang didapatkan dari pengelolaan sumber daya dan juga bantuan dari pemerintah yang berupa dana perimbangan khususnya DAK, diharapkan akan mendorong peningkatan alokasi dana untuk mensejahterakan masyarakat. Pengalokasian dana belanja modal untuk kesejahteraan khususnya dibidang pendidikan diharapkan lebih besar untuk kemajuan daerah dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Belanja modal ini dapat berupa pembangunan gedung sarana dan prasarana yang memadai untuk kenyamanan bersekolah.

Kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM didasarkan kepada pemikiran bahwa pendidikan tidak sekedar menyiapkan peserta didik agar mampu masuk dalam pasran kerja, namun lebih dari pada itu, pendidikan merupakan salah satu upaya pembangunan watak bangsa (*national character building*) seperti kejujuran, keadilan, keikhlasan, kesederhanaan dan keteladanan. Penggunaan indikator kesejahteraan yang komprehensif dan akomodatif terhadap konsepsi pembangunan yang berkelanjutan sangat penting.

1.6.2 Pengaruh Bidang Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan hasil analisis uji regresi berganda yang telah di olah dengan menggunakan SPSS16. Dari olahan data yang telah dilakukan menunjukkan bahwa tingkat kesehatan tidak berpengaruh signifikan secara staristic terhadap indeks pembangunan manusia secara parsial. Dimana kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia, secara otomatis memicu peningkatan indeks pembangunan manusia, Menurut Lains dan Pasay yang lebih menekankan aspek pendidikan dalam pembangunan manusia, Tjiptoherijanto (1989).

Melihat mutu manusia dari sisi lain yaitu dari sisi kesehatan dimana kesehatan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi sumber daya manusia, dengan kata lain aspek kesehatan turut mempengaruhi kualitas manusia. Kekurangan kalori, gizi, ataupun rendahnya derajat kesehatan bagi

penduduk akan menghasilkan kualitas manusia yang rendah dengan tingkat mental yang terbelakang. Oleh karena itu, diperlukan anggaran khusus untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat melalui pengeluaran pemerintah.

1.6.3 Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia

Berdasarkan hasil analisis bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Telah dijelaskan bahwa pembangunan sosial merupakan pendekatan pembangunan secara eksplisit berusaha mengintegrasikan proses pembangunan ekonomi dan sosial. Pembangunan sosial tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya pembangunan ekonomi, sedangkan pembangunan ekonomi tidaklah bermakna kecuali diikuti dengan peningkatan kesejahteraan sosial dari populasi sebagai suatu kesatuan. Pembangunan ekonomi atau lebih tepatnya pertumbuhan ekonomi merupakan syarat bagi tercapainya pembangunan manusia karena dengan pembangunan ekonomi terjamin peningkatan produktivitas dan peningkatan pendapatan.

Tingkat pembangunan manusia yang relatif tinggi akan mempengaruhi kinerja pertumbuhan ekonomi melalui kapabilitas penduduk dan konsekuensinya adalah peningkatan produktivitas dan kreativitas masyarakat. Dengan meningkatnya produktivitas dan kreativitas tersebut, penduduk dapat menyerap dan mengelola sumberdaya yang penting bagi pertumbuhan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aswar , 2007 , *Metode Penelitian Social Ekonomi*, Jakarta PT Bumi Aksara
- Badan pusat statistic (BPS) *Sumbawa, Sumbawa dalam angka 2013, Sumbawa dalam angka 2014, Sumbawa dalam angka 2015. Sumbawa dalam angka 2016. Sumbawa dalam angka 2017*
- Badan Pusat Statistik 2017 *indeks pembangunan manusia provinsi nusa tengara barat.*
- Evi Sarwendah Habeahan, 2015 *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Pakpak Bharat (Sumatera Utara) Periode 2004-2013.*
- Gujarti . (2004) *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Atas Pendidikan, Kesehatan Dan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 1969 – 2009*
- Kansil Dkk, 2008 *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Midglay, 1995 *Mengutamakan Manusia Didalam Pembangunan Indonesia.*
- Mirza Dkk, 2012. *pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia.* <http://google.co.id. books..>
- Putra Dkk .2015, *Ekonomi Dan Pembiayaan Pendidikan* Bandung, Alfa BETA Bandung.
- Samuelson dkk, 2003 *Ilmu Ekonomi Mikro*, Jakarta, PT. Media Global Edukasi
- Sadono Sukirno 2004 *makro ekonomi*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Subana dan sudrajad. 2005 *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung.
- United nation development program, 2004. *the economics demorcracy: financing human development in Indonesia.* Published jointly by BPS – Statistic indonesia